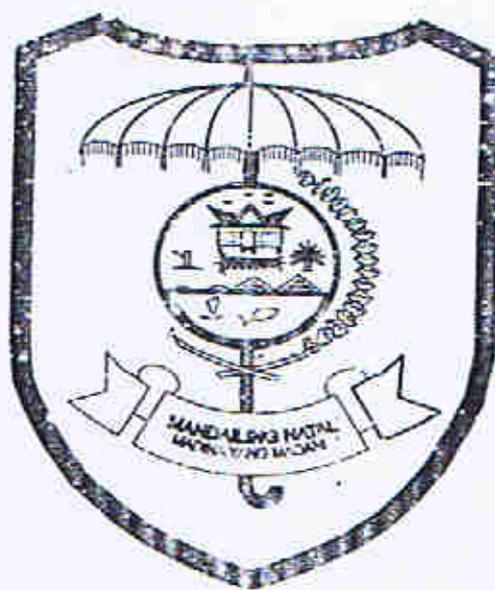


**RENSTRA  
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN 2011 – 2016**



**DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**2012**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011 – 2016 telah selesai dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.

Rancangan Renstra SKPD Dinas Perhubungan dan Informatika ini disusun sebagai bahan dasar bagi Kepala Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Pelantikan.

Penyusunan Rancangan Renstra ini telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Mandailing Natal 2011 – 2016.

Kami menyadari bahwa Rancangan Renstra yang telah disusun ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu kami menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Panyabungan, 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal difandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi" yang dijabarkan sebagai berikut:

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah untuk rencana kerja tahunan.

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal memiliki tugas melaksanakan upaya keselamatan penumpang dan informasi dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Isu Bidang Perhubungan :
  - 1). Kurangnya SDM baik kuantitas maupun kompetensi
  - 2). Minimnya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - 3). Lalu Lintas yang tidak nyaman di Ibukota Kabupaten maupun beberapa Kecamatan karena Terminal belum ada
- b. Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan dan sarana administrasi dan perkantoran.
- c. Perlunya pengembangan dan pembangunan bidang Informatika dan Telekomunikasi sesuai perkembangan teknologi informasi

Dalam menjalankan fungsi pelayanan keselamatan penumpang Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal kepada masyarakat luas sering tidak terlayani secara optimal akibat kendala-kendala yang ada sehingga masyarakat tidak dapat merasakan pelayanan prima, Isu dan masalah mendesak adalah :

- a. Pelayanan Dinas Perhubungan dan Informatika dalam keselamatan penumpang dirasakan masih kurang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap angkutan dan lalu lintas.
- b. Dinas Perhubungan dan Informatika Belum bisa mengawasi jaringan informasi yang berkembang disebabkan masih kurangnya peraturan yang mengatur hal tersebut

**BAB VII  
PENUTUP**

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan baik dalam rangka regulasi maupun dalam rangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016 disusun untuk menjawab tantangan dan peluang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal

**" TERCIPTANYA PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA YANG HANDAL  
DAN DAPAT MENOPANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT"**

Visi dan misi ini sekaligus merupakan komitmen Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Bupati Mandailing Natal.

Panyabungan, 2012  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
DAN INFORMATIKA  
KAB. MANDAILING NATAL,

  
HARLAN BATUBARA, SH  
PEMBINA  
NIP.19620903 199303 1 003